

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARGATIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

DAVINA PUTRI SALSABILA

Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur memerlukan lahan luas sehingga pemerintah melakukan pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Bendungan Margatiga terdapat masalah dalam hal ganti rugi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi oleh pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, kemudian data diolah melalui tahapan pemilihan, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Margatiga pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam tahap pelaksanaan ganti rugi dan penyerahan hasil masih ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Penilaian tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta bentuk ganti rugi yang disepakati berupa uang tunai. Hambatan dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah atas pembangunan Bendungan Margatiga, yaitu perubahan regulasi, ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi, keterlambatan pencairan dana LMAN, sengketa kepemilikan tanah, temuan *mark up* tanam tumbuh, serta status hukum lahan eks kawasan hutan yang belum tuntas.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Bendungan Margatiga

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMPENSATION FOR LOSSES IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST FOR THE CONSTRUCTION OF THE MARGATIGA DAM IN EAST LAMPUNG REGENCY

By

DAVINA PUTRI SALSABILA

The construction of the Margatiga Dam in East Lampung Regency requires extensive land acquisition carried out by the government under Law Number 2 of 2012. In its implementation, problems related to compensation have arisen. This research examines the implementation of compensation in land acquisition for the construction of the Margatiga Dam in East Lampung Regency and the factors hindering the compensation process.

This research employs a normative and empirical juridical approach. The data used consist of primary and secondary data. Data collection was carried out through literature study and field study, then processed through stages of selection, classification, and data organization. The data were analyzed using a descriptive qualitative method.

The results of this study show that the implementation of land acquisition for the construction of the Margatiga Dam has generally complied with the applicable laws and regulations; however, several practices within the stages of compensation and handover of results were found to deviate from the established legal provisions. The land acquisition process consisted of planning, preparation, implementation, and handover, with land valuation conducted independently by the Public Appraisal Office (KJPP) and compensation agreed upon in the form of monetary payment. Despite this, various obstacles were encountered during the compensation process, including frequent changes in regulations, lack of policy harmonization among institutions, delays in fund disbursement by the State Asset Management Agency (LMAN), land ownership disputes, findings of inflated assessments of crops and structures, and unresolved legal status issues concerning former forest areas.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Margatiga Dam